

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arifuddin, N, 2016, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) yang Partisipatif." *Legal Pluralism: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Armen Yasir, 2010, Makalah Hukum dan Politik, disampaikan pada perkuliahan semester genap Tahun ajaran 2009-2010 di Bagian HTN FH Unila.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta:Grafindo Persada.
- Boy Yendra Tamin, SH.MH, Fungsi Legislasi Dprd Dan Pembentukan Peraturan Daerah, diunduh dari <http://boyyendratamin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html>.
- Bintoro, R. W, 2010, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern." *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3).
- Edminuddin & Rosadi, Otong, 2017, "Efektivitas Fungsi DPRD Kabupaten Kerinci dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah," *Journal of Swara Justisia* Volume 1, Issue 2, June 2017, ISSN 2579-4701.
- F.Budi Hardiman, 2004, *Filsafat Modern: Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Franz Magnis-Suseno, 2004, 75 tahun Jurgen Habermas, *Basis* (Desember, 2004).
- Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Luc J. Wintgens, 2002, *Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation*, Hart Publishing, Oregon, USA.
- Nuri Evirayanti, N, 2009, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi)*, Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana.

- Rumbia, Wali Aya, 2009, "Perekonomian Nasional Ditinjau dari Tingkat Pertumbuhan Ekonomi."
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Soebono Wirjosoegito, 2004, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif, ed. 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutomo. 2010. *Manajemen Sekolah*. Semarang: UNNES Press.
- Tambunan, Tulus T. H. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendement UUD 1945*, Penerbit, Cerdas pustaka, Cetakan pertama

Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 3) UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 4) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- 6) UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- 7) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD
- 8) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
- 11) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.
- 12) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.
- 13) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 14) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 15) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Sumber Lain :

<https://grobogankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/120#accordion-daftar-subjek3>

<https://jateng.bps.go.id/mod/exportData/cetak.php>

<https://bapeda.grobogan.go.id/dokumen/data-statistik/35-letak-geografis-dan-sumber-daya-alam-kabupaten-grobogan>

<https://www.grobogan.go.id/pemerintahan/profil-pemerintahan/visi-misi>, diakses 3 Januari 2018.

http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/05/implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf, diunduh tanggal 15 Maret 2011, PKL, 19:43 WIB

Peran Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, <http://heryabduh.blogspot.co.id/2009/09/peranan-fungsi-legislasi-dprd-dalam.html?m=1>, diakses 5 Januari 2018,

Rapat Kerja Panitia Khusus I Tahun 2017 DPRD Kabupaten Grobogan

Sofiana Hanjani, 2014, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*,

Suharjono, Muhammad, 2014, “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah,” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19, hal. 21 – 37.

Usulan Quota 90 Toko Modern Ditolak, <http://www.grobogantoday.com/2017/05/usulan-kuota-90-toko-modern-ditolak.html>, diakses 3 November 2017, Pukul 03.51.

Wijayanti, Monica Galuh Sekar; Saraswati, Retno; Indraja, 2016, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2.

